THE ROLE OF KING JA'FAR WHICH IS THE VIEW OF THE YOUTH OF RIAU IN THE POLITICS OF THE KINGDOM OF RIAU LINGGA IN 1806-1832

Raja Rischa Dwi Lestari*, Dra. Bedriati Ibrahim, M.Si, Dr.Ahmal, M.Hum****
raja.rischadwilestari@student.unri.ac.id, bedriatiibrahim@gmail.com, Ahmal.ur81@gmail.com
Phone Number. 081364191023

History Education
Departement of Social Sciences Education
Faculty of Teacher Training and Education
Riau University

Abstract: *The Malay Kingdom of Riau Lingga is an Islamic kingdom located in the Riau Archipelago which was originally a territory including Johor, Pahang, this kingdom was formed based on the agreement of the United Kingdom (UK) and the Netherlands in 1824 with Sultan Abdurrahman Muazzamsyah as the first sultan of the Riau Lingga Kingdom. Then this is where the role of Yang Dipertuan Muda Riau began to participate in the government of the Kingdom of Riau Lingga as a representative of the sultan or Yang Dipertuan Besar of the kingdom. The purposes of this study are 1) To find out a brief history of the Riau-Lingga Malay Kingdom, 2) To find out how the process of revitalizing Raja Ja'far into YDPM VI, 3) To find out the role of King Ja'far in the politics of the Riau Lingga Kingdom in 1806- 1832, 4) To find out the role of the Bugis in the Riau Lingga Kingdom. The method used in this research is a qualitative approach method. The research location is in Tanjung Pinang, Riau Islands. The results showed the role of Raja Ja'far YDPM VI in the politics of the Riau Lingga Kingdom.*

Key Words: *History, Riau Lingga Kingdom*

PERANAN RAJA JA'FAR YANG DIPERTUAN MUDA RIAU KE VI DALAM POLITIK KERAJAAN RIAU-LINGGA TAHUN 1806-1832

Raja Rischa Dwi Lestari*, Dra. Bedriati Ibrahim, M.Si, Dr.Ahmal, M.Hum****
raja.rischadwilestari@student.unri.ac.id, bedriatiibrahim@gmail.com, Ahmal.ur81@gmail.com
Nomor Hp.081364191023

Program Studi Pendidikan Sejarah
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Riau

Abstrak: Kerajaan Melayu Riau Lingga merupakan kerajaan islam yang berada di wilayah Kepulauan Riau yang semula wilayah kekuasaan termasuk Johor, Pahang, Kerajaan ini dibentuk berdasarkan perjanjian Britania Raya (Inggris) dan Belanda pada tahun 1824 dengan Sultan Abdurrahman Muazzamsyah sebagai sultan pertama Kerajaan Riau Lingga. Kemudian disinilah peran dari Yang Dipertuan Muda Riau mulai ikut kedalam pemerintahan Kerajaan Riau Lingga sebagai wakil dari sultan atau Yang Dipertuan Besar kerajaan. Adapun tujuan penelitian ini adalah 1)Untuk mengetahui sejarah singkat Kerajaan Melayu Riau-Lingga, 2) Untuk mengetahui bagaimana proses pentabalan Raja Ja'far menjadi YDPM VI, 3) Untuk mengetahui peran Raja Ja'far di dalam politik Kerajaan Riau Lingga tahun 1806-1832, 4) Untuk mengetahui peran Bugis di dalam Kerajaan Riau Lingga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian adalah di Tanjung Pinang Kepulauan Riau. Hasil penelitian menunjukkan peranan dari Raja Ja'far YDPM VI di dalam politik Kerajaan Riau Lingga.

Kata Kunci: Sejarah, Kerajaan Riau Lingga, Yang Dipertuan Muda Riau

PENDAHULUAN

Latar belakang penelitian:Sejarah adalah catatan penting suatu peristiwa yang pernah terjadi dalam kehidupan umat manusia, masyarakat, bangsa, maupun negara, disusun secara kronologis menurut urutan waktu, lalu diberi penafsiran dan analisa kritis sehingga mudah dimengerti dan dipahami. Sejarah juga memberikan gambaran mengenai perkembangan kerajaan-kerajaan melayu di Indonesia. Sejarah dunia melayu memperlihatkan sejumlah daerah-daerah khususnya di Riau pada masa kemaharajaan melayu. Pada masa kerajaan, para Kolonial datang ke tanah melayu dengan niat ingin menguasai daerah-daerah untuk dijadikan daerah jajahan, dimana mereka ingin menguasai seluruh pemerintahan baik itu didalam bidang politik maupun ekonomi serta ingin ikut campur di dalam pemerintahan kerajaan. Salah satu daerah yang dijadikan kekuasaan para Kolonial adalah daerah Riau, yang dimana pada masa kerajaan daerah Riau masih meliputi daerah-daerah sekitaran Kepulauan Riau yang dikuasai oleh kerajaan Melayu yaitu kerajaan Johor yang dipimpin oleh seorang Sultan dan didampingi oleh seorang raja yang bergelar Yang Dipertuan Muda (YDPM).

Munculnya gelar YDPM ini memperlihatkan suatu bentuk pemerintahan secara tidak langsung yaitu kekuasaan yang sebenarnya terletak di belakang Sultan.Dari sinilah munculnya YDPM penerus keturunan yang berasal dari Suku Bugis. Untuk mempertahankan gelar ini mereka banyak melakukan perkawinan antara Suku Bugis dengan keluarga Diraja Melayu. Kemudian gelar inilah yang menjadi penerus para YDPM lainnya, dimana mereka mendapat gelar ini setelah YDPM yang sebelumnya wafat dan digantikan dengan anak keturunan Bugis yang juga keluarga Diraja Melayu.Gelar yang di sandang oleh Suku Bugis di dalam kerajaan merupakan suatu bentuk jabatan yang memperbolehkan mereka untuk ikut campur di dalam pemerintahan. Raja Ja'far salah satu dari jabatan Yang Dipertuan Muda menggantikan jabatan Yang Dipertuan Muda sebelumnya yaitu Raja Ali Yang Dipertuan Muda Riau ke V. Raja Ja'far merupakan anak dari Raja Haji Fisabilillah Yang Dipertuan Muda ke IV, mereka adalah keturunan dari Suku Bugis yang telah banyak melakukan perkawinan dengan keluarga Diraja Melayu, sehingga mereka mendapatkan jabatan Yang Dipertuan Muda di dalam Kerajaan Melayu. [1]

Dari uraian diatas maka penulis merasa tertarik untuk meneliti Peranan dari Yang Dipertuan Muda di dalam politik pemerintahan Kerajaan Riau Lingga. Maka dalam hal ini penulis berusaha untuk mendeskripsikan serta mendokumentasikan kedalam bentuk tulisan dengan judul "Peranan Raja Ja'far Yang Dipertuan Muda Riau ke VI dalam Politik Kerajaan Riau Lingga tahun 1806-1832".

Pembeberan Masalah: Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan penulis, maka penulis perlu mebeberkan masalah yang berkaitan dengan penelitian ini:

1. Bagaimana sejarah singkat Kerajaan Melayu Riau-Lingga?
2. Bagaimana proses pentabalan Raja Ja'far menjadi Yang Dipertuan Muda Riau ke VI tahun 1806-1832?
3. Apa peranan Raja Ja'far di dalam politik Kerajaan Melayu Riau Lingga tahun 1806-1832?
4. Bagaimana Bugis bisa berkuasa di dalam Kerajaan Melayu Riau LIngga tahun 1806-1832.

[1] Mardiana Nordin, *Politik Kerajaan Johor 1718-1862*.(Johor Bahru:Yayasan Warisan Johor:2008)Hlm. 61

METODE PENELITIAN

Sistematika metode penelitian: Pada penulisan ini penulis menggunakan metode historis, yang dapat digunakan dalam pendekatan permasalahan yang berhubungan dengan peranan Raja Ja'far Yang Dipertuan Muda Riau ke VI dalam Politik Kerajaan Riau Lingga tahun 1806-1832. Metode ini merupakan metode yang bertujuan untuk membuat rekonstruksi ulang masa lampau secara sistematis dan objek dengan pengumpulan, mengevaluasi, verifikasi dan mensistensikan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat. Dikatakan metode sejarah apabila metode tersebut membuat uraian yang mengenai kajian masa lampau atau peristiwa yang telah lalu dengan menggunakan sumber-sumber sejarah yang sistematis.

Selain metode historis, penulis juga menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian ini. Metode penelitian kualitatif merupakan cara penelitian yang bersifat deskriptif, berangkat dari data dan memanfaatkan teori untuk menemukan teori yang baru. Metode Sejarah yaitu suatu cara ataupun proses dalam menganalisa data mengenai kejadian atau peristiwa masa lampau yang benar-benar terjadi dan kemudian dijadikan sumber sejarah yang tersusun secara sistematis. Metode ini bertujuan untuk membuat suatu ataupun sebuah rekontruksi sejarah yang bersifat objektif dan sistematis sesuai dengan data dan sumber data yang diperoleh, dan di verifikasi agar data tersebut benar dan tepat sehingga didapatkan fakta dan dapat ditarik kesimpulan dengan tepat[2].

Adapun tahapan-tahapan dari metode sejarah adalah sebagai berikut:

1. Heuristik adalah proses mencari untuk menemukan sumber-sumber.
2. Kritik yaitu pengujian sumber-sumber yag ditemukan yang bertujuan menyeleksi data menjadi fakta. Ada dua macam kritik yakni kritik ekstern dan kritik intern.
3. Interpretasi yakni tahap penasiran.
4. Historiografi yaitu peulisan sejarah (berasal dari kata graphien dalam bahasa Yunani).

Teknik Pengumpulan data, yaitu:

1. Teknik Kepustakaan
   Teknik kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memahami buku-buku yang relevan dengan penelitian ini. Buku-buku tersebut dapat berupa buku-buku sejarah yang bersifat nasional atau buku-buku sejarah yang bersifat lokal yang menjadi sumber pendukung dari penelitian ini.
2. Wawancara
   Teknik wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada informan, caranya adalah bercakap cakap dengan informan terkait penelitian ini. Adapun wawancara yang dilakukan meliputi:Wawancara dengan informan seperti Raja Masnur (Selaku budayawan dan sejarawan), H. Abu Samah Arab (Selaku Ketua Lembaga Adat Melayu), Raja Usman Aziz (Selaku budayawan dan sejarawan)
3. Teknik Dokumentasi
   Pada teknik ini peneliti melakukan pengumpulan data berupa tulisan-tulisan tentang bukti nyata dari sumber-sumber yang diperoleh.

[2] Helius Sjamsuddin. *Metodologi Penelitian.(*Yogyakarta:Penerbit Ombak, 2012)hlm. 10

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan:

(A). Sejarah singkat Kerajaan Riau Lingga:Kerajaan Riau-Lingga adalah kerajaan islam yang berpusat di Kepulauan Riau yang merupakan pecahan dari Kerajaan Johor. Kerajaan Riau Lingga ini di dirikan di Lingga setelah Sultan Mahmud Syah III kalah melawan Belanda dan gugurnya seorang pahlawan Raja Haji Fisabilillah, karena letak pusat kerajaan pada waktu itu di hulu sungai Riau (daerah Kota Piring Tanjung Pinang) dimana letaknya berdekatan dengan Residen Belanda di Tanjung Pinang, maka sultan memutuskan untuk memindahkan pusat pemerintahannya jauh dari Tanjung Pinang yaitu di Daek Lingga. Kerajaan ini dibentuk berdasarkan perjanjian antara Britania Raya (Inggris) dengan Residen Belanda pada tahun 1824 dengan Sultan Abdurrahman Muazzamsyah sebagai sultan di Kerajaan Riau Lingga setelah dibuat perjanjian tersebut dan dengan Raja Ja'far sebagai Yang dipertuan Muda Riau ke VI sebagai wakil dari sultan atau sekarang disebut dengan Perdana Menteri.[3]

(B). Proses Pentabalan Raja Ja'far Yang Dipertuan Muda Riau ke VI: Jabatan sebagai Yang Dipertuan Muda Riau (YDPM) bukanlah jabatan yang rendah untuk ukuran kerajaan melayu pada masa itu. Yang Dipertuan Muda Riau dapat dikatakan sebagai jabatan tertinggi kedua setelah jabatan sultan atau Yang Dipertuan Besar. Pada masa sebelumnya jabatan Yang Dipertuan Muda sama dengan jabatan Bendahara Kerajaan, artinya selain dari ditangan sultan urusan kerajaan ada ditangan Yang Dipertuan Muda.[4] Posisi sebagai YDPM dapat disebut sebagai wakil sultan atau sama dengan Perdana Menteri, sehingga posisi tersebut sangat memungkinkan pemangkunya untuk mengambil kebijakan strategis di lingkungan kerajaan. Sementara pada masa pemerintahan sebelumnya hal tersebut dipercayakan kepada pemegang jabatan menteri serta majelis orang kaya melayu, sehingga dengan adanya Yang Dipertuan Muda maka membuka peluang bagi pihak yang tidak lagi memiliki jabatan berubah menjadi oposisi. Jabatan YDPM juga memiliki kekuasaan yang cukup besar, jabatan YDPM mencakup jabatan panglima perang dan hubungan luar negeri, sementara jabatan Yang Dipertuan Besar atau Sultan mengurus perihal adat istiadat, agama, hukum, serta keamanan di dalam negeri.[5] Dengan kata lain Yang Dipertuan Muda Besar lebih mengurus pada urusan dalam negeri dan Yang dipertuan Muda mengemban tugas untuk mengurus urusan eksternal kerajaan yang kemudian lama kelamaan kondisi ini mulai memperlihatkan ketimpangan dengan mendominasinya peran YDPM di dalam kerajaan. Dengan masuknya pengaruh orang-orang Bugis kedalam struktur pemerintahan kerajaan yang kemudian mengesampingkan peranan sultan, tidak dapat dipungkiri bahwa keikutsertaan orang bugis dalam perebutan kekuasaan akhirnya merubah struktur pemerintahan tradisional Kerajaan Johor hingga akhirnya bubar menjadi Kerajaan Riau Lingga. Beikut merupakan silsilah dari YDPM ke VI:

---

[3] Syahrul Rahmat.2019.*Bugis di Kerajaan Melayu, Eksistensi orang Bugis dalam pemerintahan Kerajaan Johor-Riau-Lingga-Pahang.*Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu:Kepulauan Riau.

[4] Hasan Junus. *Engku Puteri Raja Hamidah Pemegang Regalian Kerajaan Riau.*(Pemerintahan Kota Tanjung Pinang dengan UNRI Press Pekanbaru:2002).Hlm 58-61

[5] Rida K Liamsi.*Berhutang Pada Persebatian Melayu Bugis, dalam Firdaus L.N dkk, Tamadun Melayu Lingga* .(Dinas Kebudayaan Kabupaten Lingga.2018)Hlm.39

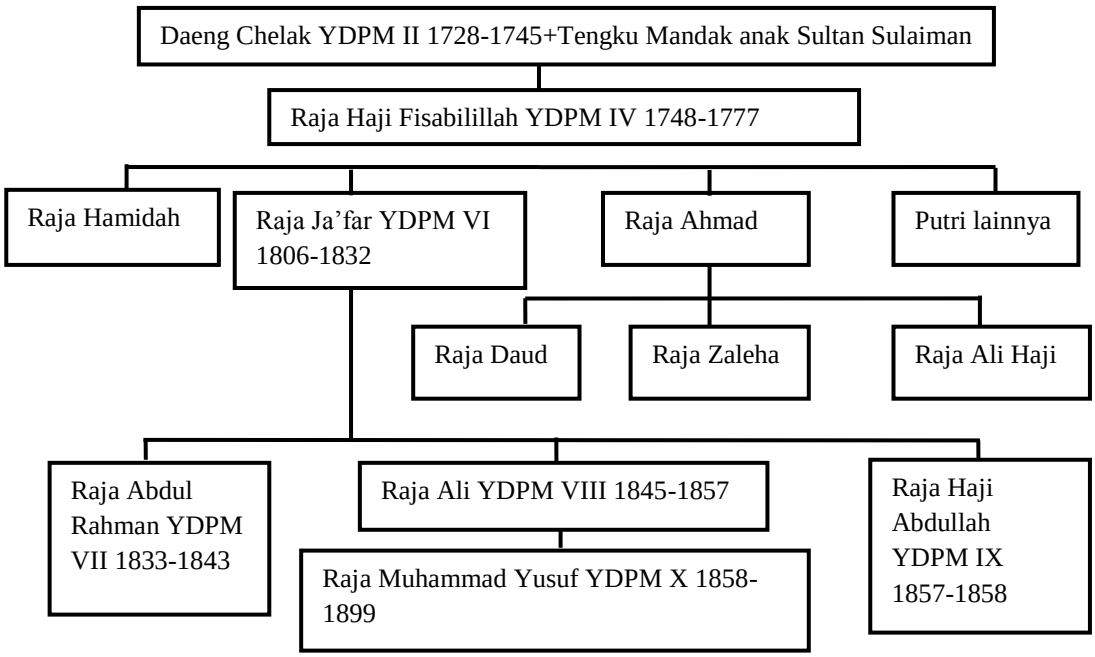

Gambar 1. Silsilah dari YDPM ke VI

(C). Peranan Raja Ja'far Yang Dipertuan Muda Riau ke VI dalam Politik Kerajaan Riau Lingga: (a). Peranan Raja Ja'far dalam Politik Kerajaan Riau Lingga: Raja Ja'far menjabat menjadi YDPM pada masa pemerintahan Sultan Abdurrahman yang dilantik menjadi sultan pengganti setelah ayahnya Sultan Mahmud Syah III wafat. Raja Ja'far mulai memegang kekuasaan sebagai YDPM ketika terjadi perebutan kekuasaan wilayah jajahan antara Bangsa Belanda dan Inggris. Raja Ja'far ini merupakan anak dari YDPM ke VI Raja Haji Fisabilillah dan bersaudara dengan Engku Puteri Raja Hamidah (permaisuri dari Sultan Mahmud Syah III dan ibu tiri dari Sultan Abdurrahman).[6] Politik dan pemerintahan Kerajaan Riau Lingga saat itu telah mencerminkan kehidupan multicultural, tidak ada istilah pemerintahan harus berada ditangan pemuda daerah.

Yang Dipertuan Besar yang merupakan sultan melayu memimpin pemerintahan berdampingan dengan Yang Dipertuan Muda Riau, yang tidak lain adalah raja muda dari keturunan bugis. Bahkan kerajaan melayu mencapai masa kejayaannya pada masa bertahtanya Sultan Mahmud Syah III sebagai Yang Dipertuan Besar dengan Raja Haji sebagai Yang Dipertuan Muda Riau selaku pengendali roda pemerintahan kerajaan. Pada masa itu saat pengangatan sultan baru terjadi konflik kerajaan dimana pada saat wafatnya Sultan Mahmud Syah III terjadi perselisihan pendapat antara Engku Puteri dengan Raja Ja'far. Engku Puteri ingin Tengku Husein yang mengantikan ayahnya sebagai sultan, tetapi pendapat itu ditentang oleh Raja Ja'far yang menginginkan Tengku Abdurahman yang menjadi sultan. Dalam pengangkatan Tengku Abdurrahman untuk menggantikan ayahnya timbul pertentangan diantara dua kepentingan dalam penggantian sultan, yang dimana kelompok pertama lebih menekankan kepada adat istiadat kerajaan melayu harus dipertahankan dalam kaitannya dengan pergantian sultan, mereka lebih condong untuk mengangkat Tengku Husein sebagai pengganti, karena dia adalah anak sulung sultan dan sesuai dengan wasiat sultan tahun 1811, yang kuat

[6] Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.*Land of Malay History*.(Tanjung Pinang:Pemerintahan Kota Tanjung Pinang.2006)hlm.78

mempertahankan adat istiadat melayu adalah Engku Puteri Raja Hamidah dan beberapa orang pembesar kerajaan dan bendahara Tun Ali dari Pahang.

Kelompok kedua lebih menekankan perlunya mengangkat Tengku Abdurrahman sebagai pengganti sultan dengan tokoh utamanya Raja Ja'far YDPM VI. Kemudian Tengku Abdurrahman yang akhirnya dilantik menjadi sultan dikarenakan pada saat Sultan Mahmud Syah III wafat Tengku Husein tidak berada di Riau Lingga dan juga Tengku Husein tidak banyak mendapat dukungan dari pembesar kerajaan, tetapi pada hakikatnya Tengku Abdurrahman memegang tahta pemerintahan kerajaan hanya sebagai boneka atau lambang saja, yang memegang kendali pemerintahan sesungguhnya adalah Raja Ja'far Yang Dipertuan Muda Riau ke VI.[7] Struktur pemerintahan setelah orang-orang Bugis mendapatkan kedudukan dalam Kerajaan Melayu maka kekuasaan dalam kerajaan terdiri dari:

- Kekuasaan tertinggi dipegang oleh sultan selaku Yang Dipertuan Besar, memiliki hasil tanah dan hasilnya serta pemilik kerajaan itu sendiri. Selanjutnya sultan mempunyai hak untuk menjual harta miliknya hanya saja dalam pemerintahan sultan tidak dapat bebrbuat seenaknya saja.
- Yang Dipertuan Muda berasal dari keturunan Bugis dan merupakan wakil sultan atau disebut dengan perdana menteri yang bertugas untuk menjalankan pemerintahan baik sebagai legislatif maupun eksekutif. Yang Dipertuan Muda tidak dapat memiliki hak kerajaan dan hak hasil tanah. Karena itu Yang Dipertuan Muda Riau tidak mempunyai hak untuk mengatur kerajaan, maka dari itu sultan harus bermusyawarah dengan Yang Dipertuan Muda Riau.

(b). Peranan Bugis di dalam Kerajaan Melayu Riau Lingga: Kedatangan orang bugis ke tanah melayu sejak masa-masa sebelumnya bukanlah untuk melakukan ekspansi maupun mencari kekuasaan, melainkan mencari penghidupan atau sekedar ingin lepas dari kondisi politik di daerah mereka yang mulai tidak kondusif. Bersinggungan dengan kepentingan politik keluarga kerajaan melayu membawa Opu Daeng Bersaudara kedalam struktur pemerintahan kerajaan. Kekuasaan Kerajaan Johor yang melibatkan orang-orang bugis dimulai sejak abad ke-17 dan mulai menjalankan tugas sebagai YDPM pada awal abad ke-18, dan beberapa kedatangan orang bugis ke kawasan semenanjung melayu salah satunya adalah kedatangan Opu Daeng Rilakka yang merupakan bangsawan dari Kerajaan Luwu dibagian Selatan Sulawesi yang datang bersama ke lima anaknya yaitu Daeng Perani, Daeng Chelak, Daeng Marewah, Daeng Kemasi, dan Daeng Manambun. [8]

Keterlibatan orang-orang bugis yang dalam hal ini adalah anak-anak dari Daeng Rilakka. Pada awalnya keterlibatan bugis dikarenakan Tengku Sulaiman meminta bantuan kepada orang bugis untuk merebut kekuasaan tahta kerajaan terhadap Raja Kecik yang dipimpin oleh Daeng Marewah. Kehadiran orang bugis di kerajaan membawa perubahan yang besar didalam struktur pemerintahan kerajaan. Sistem pemerintahan kerajaan mulai berubah seiring masuknya bugis di dalam struktur pemerintahan sebagai Yang Dipertuan Muda. Jabatan yang diberikan kepada Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah I khusus diperuntukkan bagi keturunan Daeng Rilakka yang telah membantunya dalam perebutan kekuasaan dengan Raja Kecik. Dalam

[7] Hasil wawancara dengan Bapak Abu Samah Arab
[8] Hasil wawancara dengan Bapak Raja Masnur

perkembangannya peran Yang Dipertuan Muda untuk membangun, mengembangkan, serta mempertahankan Kerajaan Riau Lingga mulai menghilangkan batas antara Melayu dan Bugis. (c). Campur tangan Bangsa Belanda dan Inggis dalam pemerintahan Kerajaan Riau Lingga pada masa Yang Dipertuan Muda Riau ke VI: Sejak tahun 1818 Inggris dan Belanda bersaing dan mulai ikut campur kedalam pemerintahann Kerajaan Melayu Riau Lingga, masing-masing pihak saling berusaha untuk menanamkan pengaruh kedalam kerajaan. Kedua bangsa tersebut berusaha memecah belah wilayah Kerajaan Melayu Riau Lingga.

Dalam Kongres Wina tahun 1815 ditegaskan bahwa Inggris harus menyerahkan kembali wilayah jajahan Belanda termasuk Melaka dan Riau yang dikuasai oleh Inggris tahun 1795. Riau termasuk daerah yang ikut diserahkan Inggris kepada Belanda, dan pada tahun 1818 bangsa Belanda kembali ke Riau dengan Tengku Abdurrahman sebagai sultan melayu Riau Lingga, karena Belanda merasa berkepentingan maka Belanda mengakui Tengku Abdurrahman sebagai sultan Kerajaan Riau Lingga, untuk menindak lanjut pengakuan itu diadakan perjanjian tanggal 26 November 1818 yang bersisikan antara lain: 1. Sultan mengakui Belanda sebagai penguasa tertinggi di Riau, 2. Pemerintah Belanda diberi izin menambah angkatan perangnya, 3. Tidak dibenarkan mengadakan perdagangan dengan bangsa barat lainnya selain dengan Bangsa Belanda, 4. Pengangkatan raja-raja harus mendapat persetujuan Belanda[9]. Traktat London merupakan tonggak sejarah yang dicatat sebagai suatu usaha ikut campur antara Belanda dan Inggris dalam pemerintahan Kerajaan Melayu Riau Lingga yang memecahkan kesatuan wilayah melayu Riau Lingga. Traktat London pada hakikatnya telah menegaskan kekuasaan Belanda dan Inggris. Sebagai tanda persahabatan Belanda mengakui bahwa sultan dan keturunannya berhak atas Riau Lingga dan daerah taklukannya, selanjutnya dalam perjanjian itu disebutkan bahwa Belanda menempatkan wakilnya di Riau Lingga selaku residen dan berkedudukan di Tanjung Pinang. Setelah seluruh wilayah dikuasai Belanda tahun 1913, pemerintahan diatur oleh Belanda dan semenjak tahun 1913 Sultan dan Yang Dipertuan Muda Riau tidak ada lagi. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa peran dari Bugis yang menjabat sebagai Yang Dipertuan Muda Riau sangatlah besar di dalam politik Kerajaan Riau Lingga.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

1. Sejarah Kesultanan Melayu Riau Lingga diawali dari sebuah kerajaan yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau. Kerajaan Riau Lingga pada awalnya Kerajaan Melayu Riau Lingga pada awalnya menjadi satu dengan Kerajaan Johor di Malaka. Namun setelah terjadi perjanjian antara Belanda dan Inggris yang disebut dengan Traktat London, dalam perjanjian ini kekuasan dibagi menjadi dua wilayah, yaitu sebagian wilayah masuk kedalam Pemerintahan Inggris di Semenanjung Malaka sampai Temasek atau yang sekarang disebut dengan Singapura dan sebagian wilayah lainnya masuk kedalam Pemerintahan Belanda. Kawasan yang masuk ke wilayah

[9] *Surat-surat perdjandjian antara Kerajaan Riau dengan Pemerintahan VOC dan Hindia Belanda 1784-1909*. (Djakarta:Arsip Nasional RI.1970)Hlm. 36

pendudukan Pemerintahan Belanda ini disebut dengan Kerajaan Melayu Riau-Lingga.
2. Raja Ja'far Yang dipertuan Muda Riau VI merupakan anak dari Raja Haji Fisabilillah dan saudara dari Engku Puteri Raja Hamidah sebagai pemegang Regalia Kerajaan Riau Lingga. Raja Ja'far menjabat sebagai Yang Dipertuan Muda pada masa pemerintahan Sultan Abdurrahman menjabat sebagai Yang Dipertuan Besar atau Sultan.
3. Jabatan Yang dipertuan Muda di dalam Kerajaan Melayu diawali dari Sultan Sulaiman yang meminta pertolongan kepada orang-orang Bugis untuk memrebut tahta kerajaan dari Raja Kecik, sehingga jabatan yang diberikan oleh Sultan membawa orang-orang Bugis ikut serta kedalam struktur pemerintahan Kerajaan Melayu.
4. Campur tangan bangsa Inggris dan Belanda di dalam Kerajaan Melayu membawa pengaruh besar dalam struktur pemerintahan. Bangsa Inggris dan Belanda ingin memperebutkan wilayah kekuasaan Kerajaan Melayu. Kemudian terjadi perjanjian Traktat London. Traktat London merupakan tonggak sejarah yang dicatat sebagai suatu usaha ikut campur tangan antara Belanda dan Inggris di dalam Kerajaan Melayu Riau-Lingga yang memecahkan kesatuan wilayah Melayu Riau.

Rekomendasi

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dalam upaya mengupulkan dan mencari data yang dapat melengkapi dan menyempurnakan penulisan ini, maka penulis dapat menyumbangkan beberapa saran yang kiranya nanti dapat menjadi perhatian kita semua, antara lain:

1. Dalam penulisan ini penulis menyadari masih banyak kekurangan yang disebabkna oleh keterbatasan penulis mencari sumber. Diharapkan dengan adanya penelitian ini menambah khazanah pengetahuan khususnya di bidang pendidikan sejarah.
2. Diharapkan agar penelitian ini bisa menjadi bahan untuk penelitian-penelitian selanjutnya, serta bagi generasi penerus khususnya generasi muda yang diharapkan bisa mengembangkan dan melestarikan peninggalan sejarah yang ada dari Kerajaan Melayu Riau Lingga yang terdapat di Pulau Penyengat Kepulauan Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Pariwisata Kabupaten Kepulauan Riau.2002.*Raja Ali Haji:Tuhfat Al Nafis (Sejarah Riau Lingga dan daerah taklukanyya 1699-1864).*Tanjung Pinang:Yayasan Khasanah Melayu.

Daud Kadir. dkk. 2008. *Sejarah Kebesaran Kesultanan Lingga-Riau.* Lingga: Pemerintahan Daerah Kabupaten Lingga.

Disbudpar.2006. *Tanjung Pinang, Land of Malay History. T*anjung Pinang:Pemda Provinsi Kepulauan Riau**.**

Hasan Junus.2002.*Engku Puteri Raja Hamidah Pemegang Regalia Kerajaan Riau.*Tanjung Pinang:Unri Press.

Helliuss Sjamsuddin.2012. *Metodologi Sejarah.*Yogyakarta:Ombak.

Mardiana Nordin, *Politik Kerajaan Johor 1718-1862.*(Johor Bahru:Yayasan Warisan Johor: 2008)Hlm. 61

Lexy J. Moeloeng. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Rida K Liamsi.2018."*Berhutang Pada Persebatian Melayu Bugis",dalam Firdaus L.N dkk, tamadan Melayu Lingga.*Kabupaten Lingga:Dinas Kebudayaan Kabupaten Lingga.

Syahrul Rahmat.2019.*Bugis di Kerajaan Melayu, Eksistensi orang Bugis dalam pemerintahan Kerajaan Johor-Riau-Lingga-Pahang.*Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu:Kepulauan Riau.

Wawancara dengan Bapak H.Abu Samah Arab sebagai Ketua Lembaga Adat Melayu.

Wawancara dengan Bapak Raja Masnur sebagai Sejarawan dan Budayawan.